



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERI ROBERTUS S.**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **258278**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **778.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1012 m2/750 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN MENTAWAI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN MENTAWAI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 1037 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN MENTAWAI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Bangunan Seluas 608 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN MENTAWAI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 497 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN MENTAWAI, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
6. Tanah Seluas 1065 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN MENTAWAI, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **207.147.212**

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
2. MOBIL, SUZUKI IGNIS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 190.147.212

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **84.065.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.677.611**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.071.389.823**



III. HUTANG

Rp. 684.448.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 386.941.823

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.